

Konflik Politik dan Lingkungan

(Studi Tentang Pembangunan PLTU Ropa Kecamatan Maurole Kabupaten Ende)

Agustinus Salman Sidi^{1*}, Ananias R.P. Jacob², Ambrosius Dedi A. Sinu³, Rex Tiran⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: armandsidi@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the dynamics of political and environmental conflicts in the development of the Ropa Coal-Fired Power Plant (PLTU Ropa) in Maurole District, Ende Regency, and to identify the factors influencing conflicts among the local community, the government, and the company. Although the construction of PLTU Ropa was intended to support electricity supply and regional development, its implementation has generated various social, political, and environmental issues that have led to prolonged conflicts within the community. This research employed a qualitative approach using a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed using Ralf Dahrendorf's Conflict Theory, which emphasizes unequal distribution of power and authority as the primary source of social conflict. The findings indicate that the conflict originated from two major issues, namely land acquisition and environmental impacts resulting from the plant's operation. Political conflict emerged due to the community's dissatisfaction with the land acquisition process, which was perceived as lacking transparency, public participation, and fairness in compensation. Environmental conflict was driven by air pollution caused by coal dust and fly ash, which affected environmental quality, agricultural productivity, fisheries, and public health. The factors influencing the conflict include unequal power relations, weak communication and transparency, limited community participation in decision-making, and differing interests between economic development and environmental protection. The study concludes that resolving the conflict requires strengthening dialogue among stakeholders, improving transparency, and enhancing public participation to achieve a more equitable, inclusive, and sustainable development process.*

Keywords: *Community Participation; Conflict Theory; Environmental Conflict; Political Conflict; Ropa Coal-Fired Power Plant (Pltu Ropa).*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Pembangunan PLTU Ropa yang dirancang untuk mendukung penyediaan energi listrik dan pembangunan daerah dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai persoalan sosial, politik, dan lingkungan yang memicu konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf yang menekankan ketimpangan distribusi kekuasaan dan otoritas sebagai sumber utama konflik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pembangunan PLTU Ropa berakar pada persoalan pembebasan lahan dan dampak lingkungan akibat operasional pembangkit listrik. Konflik politik muncul karena masyarakat menilai proses pengadaan tanah kurang transparan, minim partisipasi, serta diduga terjadi penyimpangan dalam penentuan kompensasi. Konflik lingkungan dipicu oleh pencemaran udara akibat debu dan abu batu bara yang berdampak pada kualitas lingkungan, sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang memengaruhi konflik meliputi ketimpangan relasi kekuasaan, lemahnya komunikasi dan transparansi, rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta perbedaan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan penguatan dialog, transparansi, dan partisipasi publik agar pembangunan dapat berlangsung secara lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Lingkungan; Konflik Politik; Partisipasi Masyarakat; PLTU Ropa; Teori Konflik.

1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini mengkaji Konflik Politik dan Lingkungan dalam Pembangunan PLTU Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik dan mendorong pembangunan ekonomi, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Salah

satu proyek tersebut adalah PLTU Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Meskipun pembangunan PLTU diharapkan mampu meningkatkan pasokan listrik dan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya proyek ini justru menimbulkan berbagai konflik politik dan lingkungan yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal.

Penelitian ini penting karena mengkaji bagaimana pembangunan infrastruktur energi dapat memunculkan konflik akibat perbedaan kepentingan dan ketimpangan relasi kekuasaan. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Konflik yang memandang konflik sebagai konsekuensi dari ketimpangan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan hak dalam masyarakat. Menurut Ralf Dahrendorf (1959), konflik muncul karena adanya hubungan antara pihak yang memiliki otoritas dengan pihak yang berada pada posisi subordinat. Ketimpangan tersebut melahirkan pertentangan kepentingan yang tidak hanya menjadi sumber konflik, tetapi juga dapat mendorong perubahan sosial. Dalam konteks pembangunan PLTU Ropa, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana dominasi pemerintah dan perusahaan dalam proses pembangunan memengaruhi posisi masyarakat lokal yang terdampak secara langsung.

Konflik pembangunan PLTU Ropa berpusat pada dua persoalan utama, yaitu pengadaan tanah dan dampak lingkungan. Pada tahap pengadaan tanah, masyarakat menilai bahwa proses pembebasan lahan tidak dilaksanakan secara transparan dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi, musyawarah, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Meskipun pelepasan lahan telah dilakukan sejak tahun 2007, sebagian masyarakat mengaku tidak dilibatkan secara memadai dalam proses perencanaan maupun penentuan ganti rugi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yang kemudian diperkuat dengan penyelidikan Kejaksaan Negeri Ende terkait dugaan korupsi pengadaan lahan PLTU Ropa.

Selain persoalan pembebasan lahan, konflik semakin berkembang ketika masyarakat mulai merasakan dampak lingkungan dari operasional PLTU berbahan bakar batu bara. Warga mengeluhkan pencemaran udara akibat debu batu bara dan abu terbang (*fly ash*), yang berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Aktivitas pengangkutan batu bara juga menimbulkan debu, kebisingan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi. Produksi pertanian seperti jambu mete, kelapa, dan padi mengalami penurunan akibat debu batu bara dan terganggunya sistem irigasi, sementara hasil tangkapan nelayan juga menurun karena dugaan pencemaran di wilayah pesisir.

Berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Flores-Lembata dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nusa Tenggara Timur, turut menyuarakan aspirasi masyarakat dengan mendesak pemerintah dan pihak PLN melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan PLTU Ropa. Mereka meminta dilakukan pengujian limbah batu bara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pemerintah bersama perusahaan telah melakukan berbagai upaya penyelesaian, seperti klarifikasi, investigasi, rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kabupaten Ende, serta penerapan inovasi *co-firing* biomassa untuk mengurangi penggunaan batu bara. Namun demikian, masyarakat menilai bahwa penyelesaian tersebut belum menyentuh akar persoalan, terutama terkait keadilan dalam pembebasan lahan, transparansi, dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat terdampak. Akibatnya, aksi protes dan penolakan masyarakat masih terus berlangsung sebagai bentuk tuntutan terhadap penyelesaian konflik yang lebih adil.

Kasus PLTU Ropa menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kepentingan nasional dapat menimbulkan konflik apabila mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi faktor yang memperkuat konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan proyek tersebut. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan akuntabel agar pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan dalam proses pembangunan dan operasional PLTU Ropa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian konflik politik dan lingkungan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan energi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai Konflik Politik Dan Lingkungan Dalam Pembangunan PLTU telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia dan memberikan dasar penting bagi penelitian ini. Pertama, Solikin Mirza (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “dampak pembangkit listrik tenaga uap(pltu) terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ditinjau dalam perspektif ekonomi islam (Studi PLTU Nagan Raya)” ia menyoroti tentang dampak dari pembangunan PLTU di Nagan Raya terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Solikin Mirza juga dalam penelitiannya menyoroti soal pencemaran udara yang terjadi di wilayah Nagan Raya.

Persamaan antara penelitian Solikin Mirza dan Penelitian Saya adalah terletak pada fokus kerusakan Lingkungan yang terjadi akibat pembangunan proyek PLTU. Sementara perbedaannya adalah penelitian Solikin Mirza memfokuskan dari sudut pandang Islam dalam melihat pencemaran udara sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada konflik lingkungan dan Politik.

Kedua, Fitriani (2023), dalam penelitiannya yang berjudul “dampak pembangunan pltu terhadap perubahan sosial masyarakat di desa lampoko kecamatan balusu kabupaten barru” ia menyoroti tentang perubahan perilaku sosial dari masyarakat Desa Lampoko sejak hadirnya PLTU di wilayah mereka. Kehadiran PLTU menjadi jurang pemisah antara masyarakat yang berpenghasil tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penelitian Fitriani (2023) dan penelitian saya memiliki persamaan terletak pada Dampak Pembangunan PLTU. Kemudian yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Penelitian Fitriani lebih memfokuskan pada Dampak Sosial dari pembanguna proyek PLTU yang dimana PLTU menjadi sekat atau jurang pemisah antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada konflik politik dan Lingkungan dari pembanguna proyek PLTU.

Ketiga, Nurhanisa (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “dampak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) terhadap perkembangan ekonomi di desa lampoko, dusun bawasalo, kecamatan balusu, kabupaten barru” ia menyoroti Dampak positif dan negatif dari pembangunan PLTU terhadap Perkembangan Ekonomi masyarakat Desa Lampoko. Selain itu Nurhanisa juga menyoroti tentang keadaan Sosial dan Ekologis di sekitar wilayah pembangunan PLTU. Persamaan dari penelitian Nurhanisa dan penelitian saya adalah kedua penelitian ini sama sama fokus pada dampak yang di terima dari pembangunan PLTU. Kemudian yang menjadi perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Nurhanisa lebih

memfokuskan pada dampak perkembangan perekonomian di wilayah pembangunan PLTU, sedangkan saya lebih memfokuskan pada Konflik politik dan Lingkungan.

Keempat, Julio Danilson Da Conceicao, Sunadji, Marcelien Dj. Ratoe Oedjoe (2023) dalam penelitian mereka yang berjudul “persepsi masyarakat tentang perubahan sosial ekonomi penyebaran limbah pltu bolok terhadap kegiatan budidaya rumput laut di perairan kecamatan kupang barat” Studi ini berfokus pada limbah PLTU berdampak pada usaha perikanan/pesisir di NTT.

Kedua penelitian sama-sama mengkaji dampak pembangunan PLTU berbahan bakar batu bara di wilayah Nusa Tenggara Timur dan menyoroti ketegangan antara kepentingan pembangunan energi nasional dengan kepentingan masyarakat lokal. Baik pada penelitian terdahulu maupun penelitian saya, ditemukan adanya resistensi masyarakat terhadap operasional PLTU yang menimbulkan masalah lingkungan, seperti pencemaran udara, limbah, dan dampaknya terhadap sektor ekonomi lokal. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya peran pemerintah dan perusahaan dalam memperbaiki tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas terhadap dampak yang muncul.

Perbedaan utama kedua penelitian terletak pada fokus analisis dan objek konfliknya. Penelitian tentang terdahulu berfokus lebih spesifik pada dampak ekologis dan ekonomi dari penyebaran limbah PLTU terhadap budidaya rumput laut, sehingga fokus utamanya adalah aspek lingkungan dan kerugian ekonomi masyarakat pesisir. Sementara penelitian saya tentang PLTU Ropa memiliki cakupan yang lebih luas karena menggabungkan analisis konflik politik dan lingkungan dalam proses pembangunan, termasuk isu pembebasan lahan yang dinilai tidak sesuai regulasi, dugaan penyimpangan administrasi, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Kelima, Yohanis Antonius Maufa, Marcelien Dj Ratoe Oedjoe, Franchy Ch Liufeto (2023) dalam penelitian mereka yang berjudul “respon pertumbuhan rumput laut (*Kappaphycus alvarezii*) terhadap limbah panas pltu di perairan bolok, kabupaten kupang”. Penelitian ini berfokus pada hubungan spasial antara jarak dari sumber limbah panas PLTU dengan kondisi lingkungan perairan dan performa budidaya rumput laut *K. alvarezii*, sebagai bentuk dampak lingkungan dari pembangkit listrik berbahan batu bara di NTT.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian saya terletak pada mengkaji dampak pembangunan PLTU di Nusa Tenggara Timur serta menyoroti persoalan lingkungan yang muncul akibat operasional pembangkit listrik berbahan batu bara. Namun, keduanya berbeda dalam fokus dan pendekatannya. Penelitian Yohanis Antonius Maufa, Marcelien Dj Ratoe Oedjoe, Franchy Ch Liufeto berorientasi pada aspek ekologis-biologis, menggunakan metode eksperimen untuk mengukur pengaruh limbah panas terhadap pertumbuhan rumput laut

sebagai indikator pencemaran lingkungan. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada konflik sosial, khususnya masalah pembebasan lahan, ketidakadilan kompensasi, dan respons masyarakat terhadap dampak sosial-lingkungan melalui aksi protes, pelaporan hukum, dan advokasi. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada dimensi analisis: satu berbasis biologi lingkungan, dan yang lain berbasis sosial-kebijakan dan konflik masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, khususnya terkait interaksi antara masyarakat lokal dan pemerintah.

Menurut Creswell (2014:4), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Sementara itu, Moleong (2016:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara holistik dalam konteks alamiah. Penelitian ini dilaksanakan secara fleksibel tanpa batas waktu yang ditentukan secara pasti. Proses penelitian berakhir ketika data yang diperoleh dianggap telah memadai dan analisis telah mampu menjawab tujuan penelitian, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:399), lokasi penelitian dipilih berdasarkan adanya fenomena yang relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, karena wilayah tersebut mengalami konflik politik dan lingkungan akibat pembangunan PLTU Ropa.

Sejalan dengan itu, Moleong (2016:224–225) menjelaskan bahwa lokasi penelitian kualitatif dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut mampu memberikan informasi yang mendalam. Kecamatan Maurole dipilih karena merupakan wilayah yang terdampak langsung oleh pembangunan dan operasional PLTU Ropa, sehingga relevan untuk mengkaji dinamika konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Informan Penelitian Dan Informen Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2010:218), purposive sampling merupakan teknik penentuan informan yang dipilih karena dianggap paling mengetahui permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan itu, Moleong

(2016:132) menyatakan bahwa informan dipilih secara sengaja karena memiliki pengalaman dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan penelitian terdiri atas masyarakat terdampak (petani, nelayan, dan pemilik lahan), pemerintah (Camat Maurole dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende), serta Mosalaki sebagai tokoh adat.

Tabel 1. Informen Penelitian.

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Status
1.	Basilius Wumbu	Laki-Laki	Mosalaki
2.	Gerfasius Mei	Laki-Laki	Petani
3.	Samsul Bugis	Laki-Laki	Nelayan
5.	Heronimus Seto	Laki-Laki	Nelayan
6.	David Wumbu Paso Pande	Laki-Laki	Pemilik Lahan
7.	Blasius Wumbu Paso Pande	Laki-Laki	Pemilik Lahan
8.	Petrus Redo, S.PT	Laki-Laki	Camat Maurole
	Kanisius Se, S.Pd.,M.Ed	Laki-Laki	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende

Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2016:92), fokus penelitian merupakan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian kualitatif agar peneliti dapat memusatkan perhatian pada data yang relevan dengan tujuan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis dinamika konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa di Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Penelitian ini menitikberatkan pada (1) konflik politik antara pemerintah, perusahaan/investor, dan masyarakat akibat ketimpangan kekuasaan dan kepentingan, (2) konflik lingkungan yang ditimbulkan oleh dampak operasional PLTU terhadap kualitas lingkungan dan mata pencaharian masyarakat, serta (3) minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memicu resistensi sosial. Dengan menggunakan Teori Konflik, penelitian ini bertujuan memahami hubungan antara konflik politik, dampak lingkungan, dan proses pembangunan PLTU Ropa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data (Data Primer)

Observasi

Menurut Moleong (2016:174), observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lokasi penelitian dan aktivitas informan selama proses wawancara.

Wawancara

Menurut Moleong (2016:186), wawancara adalah percakapan antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi sesuai tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menggali data secara mendalam mengenai konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2010:240), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen, arsip, foto, dan berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara untuk meningkatkan kredibilitas data.

Rekaman

Menurut Lincoln dan Guba (1985:276), rekaman merupakan media untuk mendokumentasikan suatu peristiwa atau aktivitas. Dalam penelitian ini, rekaman digunakan sebagai alat bantu untuk merekam proses wawancara sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dianalisis kembali.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:244), analisis data merupakan proses menyusun dan mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis sehingga menghasilkan informasi dan kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum penelitian lapangan, selama proses pengumpulan data, hingga setelah penelitian selesai.

- a. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:
- b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu.
- c. Interpretasi, yaitu memberikan makna terhadap data yang telah dikategorikan.
- d. Induksi, yaitu menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta yang bersifat khusus.
- e. Triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian.
- f. Teknik Validasi Data
- g. Menurut Creswell (2014:285), validasi data merupakan upaya untuk memastikan keakuratan hasil penelitian dari sudut pandang peneliti, partisipan, maupun pembaca. Dalam penelitian ini, validasi data dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu triangulasi sumber data, member checking, penyajian deskripsi yang kaya (rich and thick description), klarifikasi bias peneliti, penyajian informasi yang berbeda (negative cases), keterlibatan peneliti secara memadai di lapangan, serta diskusi dengan rekan sejawat (peer debriefing).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan PLTU Ropa menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Pemerintah memandang PLTU sebagai proyek strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan investor berorientasi pada keberhasilan investasi dan manfaat ekonomi. Sebaliknya, masyarakat lokal, khususnya nelayan dan petani, lebih merasakan dampak negatif pembangunan, seperti penurunan hasil tangkapan ikan, menurunnya produktivitas pertanian akibat debu batu bara, serta persoalan pembebasan lahan yang dinilai tidak adil. Perbedaan kepentingan tersebut memunculkan konflik dalam pembangunan PLTU Ropa.

Dalam perspektif Lewis A. Coser, kondisi ini termasuk konflik realistik, yaitu konflik yang muncul karena perebutan sumber daya dan ketidaksesuaian kepentingan antar kelompok. Dalam kasus PLTU Ropa, sumber konflik tidak hanya berkaitan dengan manfaat ekonomi, tetapi juga menyangkut lingkungan hidup, hak atas tanah, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Ketimpangan distribusi manfaat dan beban pembangunan menjadi faktor utama yang memicu konflik.

Menurut Coser, konflik juga memiliki fungsi positif karena menjadi sarana bagi kelompok yang dirugikan untuk memperjuangkan kepentingannya. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk protes dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan, yang sekaligus memperkuat solidaritas antara nelayan, petani, dan masyarakat adat. Namun, konflik ini juga menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan, di mana pemerintah dan investor memiliki akses yang lebih besar terhadap pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat memiliki ruang partisipasi yang terbatas. Apabila tidak dikelola secara baik melalui dialog yang inklusif dan partisipatif, konflik berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih kompleks dan berkepanjangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang adil dengan melibatkan seluruh pihak agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak.

Dinamika Konflik Politik dan Lingkungan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa merupakan konflik yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah memandang PLTU sebagai proyek strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dan mempercepat pembangunan daerah. Perusahaan melihat proyek tersebut sebagai investasi yang mampu mendukung penyediaan energi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, masyarakat terdampak

lebih menyoroti persoalan pembebasan lahan, pencemaran lingkungan, serta menurunnya kualitas hidup akibat operasional PLTU.

Analisis menggunakan Teori Konflik Lewis A. Coser menunjukkan bahwa konflik yang terjadi termasuk konflik realistik, yaitu konflik yang muncul karena adanya pertentangan kepentingan terhadap sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks pembangunan PLTU Ropa, sumber daya tersebut meliputi tanah, lingkungan hidup, kesempatan ekonomi, serta akses terhadap pengambilan keputusan. Pemerintah dan perusahaan berusaha mempertahankan keberlangsungan pembangunan sebagai bagian dari kepentingan nasional, sedangkan masyarakat berupaya mempertahankan hak atas tanah, lingkungan yang sehat, dan keberlanjutan mata pencaharian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang sejak proses pembebasan lahan hingga tahap operasional PLTU. Persoalan pengadaan tanah menjadi konflik awal karena sebagian masyarakat merasa tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisme pembebasan lahan dan penentuan kompensasi. Selain itu, muncul perbedaan klaim kepemilikan tanah yang memperpanjang proses penyelesaian konflik. Walaupun sebagian masyarakat akhirnya menerima pembangunan, penerimaan tersebut lebih disebabkan oleh tekanan situasi dibandingkan adanya rasa keadilan terhadap proses yang berlangsung.

Setelah PLTU mulai beroperasi, konflik berkembang menjadi persoalan lingkungan. Debu batu bara, pencemaran udara, aktivitas bongkar muat batu bara, serta dugaan penurunan kualitas perairan menimbulkan dampak terhadap sektor pertanian dan perikanan. Petani mengalami penurunan hasil panen akibat debu yang menutupi tanaman dan terganggunya sistem irigasi, sedangkan nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan yang berdampak pada pendapatan keluarga. Dampak tersebut memperkuat persepsi masyarakat bahwa manfaat pembangunan lebih banyak dirasakan oleh pemerintah dan perusahaan dibandingkan masyarakat yang berada di sekitar lokasi PLTU.

Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan memandang bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti penyiraman jalan, penggunaan penutup pada kendaraan pengangkut batu bara, koordinasi lintas instansi, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai efektivitas langkah-langkah tersebut. Sebagian masyarakat masih merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan belum memperoleh akses informasi yang memadai mengenai pengelolaan lingkungan. Perbedaan persepsi tersebut

memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan dampak fisik pembangunan, tetapi juga dengan aspek komunikasi, transparansi, dan partisipasi publik.

Menurut Coser, konflik tidak selalu bersifat destruktif. Konflik juga memiliki fungsi integratif, yaitu memperkuat solidaritas sosial dan mendorong perubahan dalam sistem sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik mendorong masyarakat untuk membangun solidaritas dalam memperjuangkan hak-haknya. Nelayan, petani, masyarakat adat, dan pemilik lahan secara bersama-sama menyampaikan aspirasi melalui dialog, aksi protes, serta berbagai bentuk komunikasi dengan pemerintah dan perusahaan. Konflik juga mendorong pemerintah dan perusahaan melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pengelolaan lingkungan serta meningkatkan koordinasi dalam menangani berbagai keluhan masyarakat.

Namun demikian, konflik juga memiliki fungsi disintegratif apabila tidak dikelola secara adil dan transparan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembebasan lahan, keterbatasan informasi, serta lambatnya penyelesaian persoalan lingkungan menyebabkan hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan menjadi kurang harmonis. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan yang berpotensi memperpanjang konflik apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang partisipatif.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya ketimpangan struktur kekuasaan. Pemerintah dan perusahaan memiliki akses yang lebih besar terhadap regulasi, informasi, dan proses pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang relatif lebih lemah. Ketimpangan tersebut menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam memengaruhi kebijakan pembangunan sehingga berbagai bentuk protes menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kepentingan mereka. Dalam perspektif Coser, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik merupakan konsekuensi dari distribusi kekuasaan yang tidak seimbang di antara aktor-aktor yang terlibat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa merupakan konsekuensi dari perbedaan kepentingan, ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, persoalan pembebasan lahan, dampak lingkungan, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Pemerintah perlu memperkuat transparansi informasi, menjamin keadilan dalam penyelesaian persoalan lahan, serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan

lingkungan. Di sisi lain, perusahaan perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan memastikan bahwa program pengelolaan lingkungan dilaksanakan secara konsisten. Melalui pendekatan tersebut, pembangunan infrastruktur energi tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meminimalkan konflik di tengah masyarakat.

Faktor-faktor Penyebab Konflik

Faktor Penyebab Dasar

Berdasarkan hasil wawancara, faktor dasar penyebab konflik dalam pembangunan PLTU Ropa adalah persoalan pembebasan dan kepemilikan lahan serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Bapak Blasius Wumbu (Mosalaki), penentuan nilai kompensasi dilakukan secara sepihak oleh pemerintah melalui Tim 9 tanpa melibatkan masyarakat secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan memicu sengketa kepemilikan lahan, terutama setelah muncul klaim dari masyarakat pendatang yang menuntut kompensasi. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak David Wumbu Paso Pande yang menjelaskan bahwa masyarakat pendatang mengklaim tanah yang sebelumnya hanya dipinjam untuk berkebun sebagai hak milik mereka. Selain itu, Bapak Samsul Bugis dan Bapak Gerasius Mei menyatakan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga merasa diabaikan. Dengan demikian, persoalan pembebasan lahan dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi akar utama munculnya konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Faktor Pemicu

Berdasarkan hasil penelitian, konflik berkembang menjadi konflik terbuka ketika masyarakat mulai merasakan dampak operasional PLTU terhadap lingkungan dan mata pencaharian. Bapak Gerasius Mei menjelaskan bahwa debu batu bara menyebabkan kerusakan tanaman pertanian sehingga hasil panen jambu mete menurun dari sekitar 1–2 ton menjadi 800–900 kilogram per musim. Sementara itu, Bapak Samsul Bugis mengungkapkan bahwa hasil tangkapan ikan menurun akibat dugaan pencemaran laut sehingga nelayan harus melaut lebih jauh. Bapak Blasius Wumbu (Mosalaki) juga menyatakan bahwa debu batu bara mencemari permukiman warga dan tidak mendapat penanganan yang memadai dari pemerintah. Kondisi tersebut memicu aksi protes dan pemalangan jalan sebagai bentuk penolakan masyarakat terhadap aktivitas pengangkutan batu bara.

Faktor Yang Memperburuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik semakin kompleks karena kurangnya keterbukaan informasi, lambatnya respons pemerintah, dampak lingkungan yang terus berlanjut, serta sengketa kepemilikan lahan. Bapak David Wumbu Paso Pande menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah memperoleh penjelasan secara utuh mengenai dampak negatif pembangunan PLTU. Sementara itu, Bapak Blasius Wumbu (Mosalaki) menilai pemerintah kurang responsif terhadap keluhan masyarakat sehingga masyarakat adat melakukan aksi penutupan jalan dan menyampaikan laporan kepada pemerintah daerah. Selain itu, Bapak Samsul Bugis dan Bapak Gerfasius Mei menjelaskan bahwa penurunan hasil tangkapan ikan dan hasil panen terus berlangsung akibat pencemaran lingkungan. Konflik juga diperparah oleh munculnya klaim kepemilikan lahan dari masyarakat pendatang yang memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, kurangnya komunikasi, lambatnya penyelesaian keluhan, dampak lingkungan yang berkelanjutan, serta sengketa lahan menyebabkan konflik PLTU Ropa menjadi semakin kompleks dan berkepanjangan.

Dampak Konflik Pembangunan PLTU Ropa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan, konflik pembangunan PLTU Ropa menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Maurole. Dampak konflik tersebut tidak hanya dirasakan dalam aspek lingkungan, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, politik, dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak perusahaan. Konflik yang terjadi muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat yang terdampak dengan pemerintah dan perusahaan sebagai pelaksana pembangunan.

Dampak konflik yang paling dominan adalah dampak lingkungan. Masyarakat nelayan dan petani mengeluhkan pencemaran lingkungan akibat aktivitas operasional PLTU, terutama dari debu batu bara yang berasal dari proses pengangkutan dan pembongkaran batu bara. Debu tersebut menyebabkan polusi udara yang mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan sekitar. Petani mengungkapkan bahwa abu batu bara yang beterbangan berdampak pada tanaman pertanian seperti jambu mente dan padi sehingga hasil panen mengalami penurunan. Bahkan petani mengaku mengalami gagal panen akibat pencemaran tersebut. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan pengangkut batu bara yang melintas setiap hari. Nelayan juga merasakan dampak konflik terhadap kondisi laut dan hasil tangkapan ikan. Mereka menyatakan bahwa sejak PLTU mulai beroperasi, hasil tangkapan ikan mengalami penurunan karena adanya dugaan pencemaran laut dan kerusakan terumbu karang akibat limbah serta aktivitas kapal di sekitar wilayah pesisir.

Akibatnya, nelayan harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut sehingga membutuhkan biaya operasional yang lebih besar. Kondisi ini menyebabkan masyarakat pesisir mengalami kesulitan ekonomi karena pendapatan mereka menurun dibandingkan sebelum adanya PLTU.

Selain dampak lingkungan, konflik pembangunan PLTU juga menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat. Di satu sisi, pembangunan PLTU memberikan dampak positif berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Beberapa masyarakat memperoleh kesempatan bekerja di PLTU sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kehadiran PLTU juga dianggap membantu memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Flores dan Lembata yang sebelumnya masih mengalami keterbatasan listrik. Namun di sisi lain, konflik pembangunan PLTU juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi sebagian masyarakat, khususnya petani dan nelayan. Penurunan hasil panen dan hasil tangkapan ikan membuat pendapatan masyarakat berkurang secara signifikan. Dengan demikian, manfaat ekonomi pembangunan tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang memperoleh keuntungan dari pembangunan PLTU, tetapi ada juga kelompok masyarakat yang justru mengalami kerugian akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Kemudian dampak politik dan konflik kepentingan. Konflik muncul sejak proses pembebasan lahan pembangunan PLTU. Masyarakat adat merasa bahwa penentuan biaya kompensasi dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat secara penuh. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Selain itu, konflik kepemilikan lahan antara pemilik tanah adat dan masyarakat pendatang juga memperpanjang proses pembangunan PLTU karena masing-masing pihak mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut. Persoalan tersebut akhirnya diselesaikan melalui jalur adat dan jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan PLTU tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan, tetapi juga memunculkan konflik kepentingan, kekuasaan, dan hak kepemilikan tanah dalam masyarakat. Konflik politik tersebut memperlihatkan bahwa proses pembangunan belum sepenuhnya berjalan secara partisipatif dan adil bagi masyarakat lokal.

Analisis Teoritis

Pembangunan PLTU Ropa dapat dianalisis melalui teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Teori konflik Coser berangkat dari pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri atas berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut seringkali melahirkan pertentangan sosial, terutama ketika terdapat ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kekuasaan, maupun akses terhadap pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan PLTU Ropa, konflik muncul karena adanya benturan

kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal sebagai aktor yang terlibat dalam proses pembangunan.

Pemerintah dan investor memandang pembangunan PLTU sebagai bagian dari upaya modernisasi dan pembangunan ekonomi. Pemerintah menempatkan proyek tersebut sebagai kepentingan strategis nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Investor juga melihat PLTU sebagai peluang investasi yang dapat memberikan keuntungan ekonomi sekaligus memperluas aktivitas pembangunan di wilayah tersebut. Dalam perspektif ini, pembangunan dipahami sebagai simbol kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, masyarakat lokal memiliki pengalaman yang berbeda terhadap pembangunan tersebut. Nelayan dan petani sebagai kelompok yang paling terdampak justru mengalami kerugian secara ekonomi maupun lingkungan. Penurunan hasil tangkapan ikan dan produktivitas pertanian menunjukkan bahwa pembangunan tidak memberikan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, di mana kelompok dominan memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan masyarakat lokal yang justru menanggung dampak negatifnya.

Menurut teori konflik Coser, kondisi tersebut termasuk dalam konflik realistik, yaitu konflik yang muncul akibat perebutan kepentingan dan sumber daya yang terbatas. Dalam kasus PLTU Ropa, sumber daya yang dipertaruhkan bukan hanya lahan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga lingkungan hidup, ruang sosial masyarakat, serta keberlanjutan mata pencaharian. Ketika masyarakat merasa hak-haknya terancam akibat pembangunan, maka konflik menjadi bentuk respon sosial yang wajar. Konflik tersebut lahir dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap lebih menguntungkan pemerintah dan investor dibandingkan masyarakat lokal. Selain itu, teori Coser juga menekankan bahwa konflik memiliki fungsi sosial tertentu dalam masyarakat. Konflik tidak selalu dipahami sebagai sesuatu yang negatif, melainkan dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Dalam konteks PLTU Ropa, munculnya aksi penolakan, protes, dan tuntutan masyarakat menunjukkan bahwa konflik menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mempertahankan hak-hak mereka. Konflik berfungsi sebagai alat komunikasi sosial yang memperlihatkan adanya masalah dalam struktur hubungan antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Konflik yang terjadi juga memperkuat solidaritas sosial masyarakat lokal. Nelayan, petani, dan masyarakat adat mulai membangun kesadaran kolektif terhadap dampak pembangunan yang mereka alami. Solidaritas ini terlihat dari adanya kesatuan sikap dalam menolak dampak negatif PLTU serta tuntutan terhadap

keadilan lingkungan dan sosial. Dalam pandangan Coser, konflik dapat meningkatkan integrasi internal kelompok karena adanya musuh atau ancaman bersama yang dihadapi. Dengan demikian, konflik PLTU Ropa tidak hanya menghasilkan pertentangan, tetapi juga memperkuat identitas dan solidaritas masyarakat lokal.

Di sisi lain, konflik tersebut juga memperlihatkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses pembangunan. Pemerintah dan investor memiliki posisi yang lebih dominan karena menguasai akses terhadap kebijakan, modal, dan informasi. Sementara itu, masyarakat lokal berada dalam posisi subordinat dan seringkali kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan masih berlangsung secara top-down, di mana masyarakat hanya menjadi objek pembangunan tanpa memiliki ruang partisipasi yang memadai. Dalam perspektif teori konflik, ketimpangan kekuasaan seperti ini menjadi faktor utama yang memicu munculnya resistensi sosial.

Kemudian, Coser juga menjelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola secara baik dapat berkembang menjadi konflik destruktif. Dalam kasus PLTU Ropa, berlarut-larutnya keluhan masyarakat terkait pencemaran lingkungan dan pembebasan lahan menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik. Kurangnya ruang dialog antara pemerintah, investor, dan masyarakat menyebabkan ketegangan sosial terus berlangsung. Jika kondisi ini tidak segera ditangani melalui pendekatan yang partisipatif dan dialogis, maka konflik berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan mengganggu stabilitas sosial masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan teori konflik Lewis A. Coser, pembangunan PLTU Ropa dapat dipahami sebagai bentuk konflik sosial yang lahir akibat perbedaan kepentingan, ketimpangan distribusi manfaat pembangunan, serta ketidakadilan dalam relasi kekuasaan. Konflik tersebut tidak hanya menunjukkan adanya pertentangan antara kelompok dominan dan masyarakat lokal, tetapi juga menjadi sarana perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak-hak sosial, ekonomi, dan lingkungan mereka. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan agar kepentingan seluruh pihak dapat diakomodasi secara seimbang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian tentang Konflik Politik dan Lingkungan (Studi Tentang Pembangunan PLTU Ropa Kecamatan Maurole Kabupaten Ende) dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Dinamika Konflik Politik Dan Lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik politik dan lingkungan dalam pembangunan PLTU Ropa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan

antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Pemerintah dan investor memandang pembangunan PLTU sebagai proyek strategis yang penting untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Flores dan Lembata serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja. Namun, di sisi lain, masyarakat lokal menilai bahwa pembangunan tersebut belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara terbuka dan adil, terutama dalam proses pembebasan lahan dan pengambilan keputusan.

Konflik politik muncul akibat persoalan kompensasi lahan, klaim kepemilikan tanah, serta ketidakpuasan masyarakat adat terhadap proses pembangunan yang dianggap lebih berpihak pada kepentingan pemerintah dan perusahaan. Sementara itu, konflik lingkungan terjadi karena masyarakat merasakan secara langsung dampak negatif aktivitas PLTU, seperti pencemaran udara akibat debu batu bara, kerusakan tanaman pertanian, pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, dan menurunnya hasil tangkapan ikan. Dampak tersebut kemudian memicu berbagai aksi protes masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap merugikan masyarakat lokal.

Meskipun pemerintah dan pihak perusahaan telah melakukan berbagai upaya penanganan, seperti penggunaan truk tertutup, penyiraman jalan, dan pengawasan lingkungan secara berkala, masyarakat menilai bahwa langkah tersebut belum mampu mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi secara menyeluruh. Perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat terkait dampak pembangunan menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya komunikasi dalam proses pembangunan PLTU Ropa.

Dengan demikian, pembangunan PLTU Ropa tidak hanya menghadirkan manfaat ekonomi dan penyediaan energi listrik, tetapi juga memunculkan persoalan sosial, politik, dan ekologis yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan agar konflik berkepanjangan dapat diminimalisir dan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan Faktor-faktor Penyebab Konflik.

Faktor Penyebab Dasar Faktor dasar penyebab konflik dalam pembangunan PLTU Ropa adalah persoalan pembebasan dan kepemilikan lahan serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Konflik muncul karena masyarakat merasa proses penentuan kompensasi lahan dilakukan secara sepihak, terjadi sengketa kepemilikan lahan dengan masyarakat pendatang, serta adanya ketidakpuasan terhadap nilai ganti rugi yang diberikan. Selain itu, masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sejak tahap awal pembangunan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun perusahaan. Kondisi tersebut kemudian

menjadi akar munculnya ketegangan sosial antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan dalam pembangunan PLTU Ropa.

Faktor Pemicu Faktor pemicu konflik dalam pembangunan PLTU Ropa muncul ketika masyarakat mulai merasakan secara langsung dampak negatif dari aktivitas operasional PLTU, terutama berupa pencemaran lingkungan akibat debu dan limbah batu bara. Dampak tersebut menyebabkan penurunan hasil pertanian dan hasil tangkapan nelayan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap respons pemerintah dan perusahaan dalam menangani dampak lingkungan semakin memperbesar ketegangan yang ada. Kondisi ini kemudian mendorong masyarakat melakukan berbagai aksi protes, seperti pemalangan jalan dan penolakan terhadap aktivitas pengangkutan batu bara, sehingga konflik berkembang dari kondisi laten menjadi konflik terbuka.

Faktor yang memperburuk faktor yang memperburuk konflik dalam pembangunan PLTU Ropa adalah kurangnya keterbukaan informasi mengenai dampak pembangunan, lambatnya respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat, dampak lingkungan yang terus berlangsung, serta sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan masyarakat pendatang. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan, memperbesar rasa kecewa akibat kerugian yang dialami petani dan nelayan, serta memperpanjang konflik melalui berbagai aksi protes dan perselisihan hukum. Akibatnya, konflik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan PLTU, tetapi berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hak atas lahan yang semakin kompleks dan berkepanjangan Dampak Konflik Pembangunan PLTU Ropa.

Konflik pembangunan PLTU Ropa menimbulkan dampak yang luas dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan politik. Dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah pencemaran lingkungan yang menyebabkan penurunan hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani dan nelayan. Di sisi lain, pembangunan PLTU juga memberikan manfaat ekonomi berupa terbukanya lapangan pekerjaan dan peningkatan pasokan listrik bagi wilayah Flores dan Lembata. Namun, manfaat tersebut tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Selain itu, konflik juga memunculkan ketegangan politik dan konflik kepentingan terkait pembebasan lahan, kompensasi, serta hak kepemilikan tanah. Dengan demikian, pembangunan PLTU Ropa menghasilkan dampak yang bersifat ganda, yaitu memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian dan konflik bagi kelompok masyarakat lainnya yang terdampak secara langsung.

Dengan demikian, konflik dalam pembangunan PLTU Ropa tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut masalah sosial, ekonomi, politik, dan relasi kekuasaan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan serta penanganan dampak lingkungan agar konflik serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar pemerintah meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait seluruh proses pembangunan PLTU, termasuk dokumen AMDAL dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemerintah juga perlu membangun mekanisme dialog yang lebih partisipatif dan inklusif agar masyarakat memiliki ruang yang setara dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan kepentingannya. Selain itu, pihak investor dan pengelola PLTU perlu lebih memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan meminimalkan dampak pencemaran terhadap laut, udara, dan lahan pertanian masyarakat serta meningkatkan tanggung jawab sosial melalui program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak langsung.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan tetap memperjuangkan hak-haknya secara kolektif dan damai melalui dialog, musyawarah, maupun advokasi sosial. Solidaritas sosial masyarakat juga perlu diperkuat agar mampu menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan bersama. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak kesehatan masyarakat, perubahan sosial budaya, serta kebijakan energi nasional yang berkaitan dengan pembangunan PLTU di daerah lokal. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal sehingga pembangunan dapat berjalan secara lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Conceicao, J. D. D., Sunadji, & Oedjoe, M. D. R. (2023). Persepsi masyarakat tentang perubahan sosial ekonomi penyebaran limbah PLTU Bolok terhadap kegiatan budidaya rumput laut di perairan Kecamatan Kupang Barat. *Jurnal Aquatik*, 6(2). <https://doi.org/10.35508/aquatik.v6i2.12838>
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Working with conflict: Skills and strategies for action*. Zed Books.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks*. International Publishers.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action* (Vol. 1). Beacon Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *JDIH BPK: Database peraturan*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Marx, K., & Engels, F. (1970). *The German ideology*. Progress Publishers.
- Martínez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781843765486>
- Maufa, Y. A., Oedjoe, M. D. R., & Liufeto, F. C. (2023). Respon pertumbuhan rumput laut (*Kappaphycus alvarezii*) terhadap limbah panas PLTU di perairan Bolok, Kabupaten Kupang.
- Mills, C. W. (1956). *The power elite*. Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Peluso, N. L., & Watts, M. (Eds.). (2001). *Violent environments*. Cornell University Press.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining environmental justice: Theories, movements, and nature*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.001.0001>
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Sumartono. (2019). Dinamika peraturan sosial dalam teori. <https://doi.org/10.36914/k10ng203>
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.